



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

Sekolah Lapangan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SL-PSDA): upaya peningkatan kapasitas LMDH dalam pembangunan hutan melalui PHBM (di KPH Malang)



Latar Belakang

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu pendekatan dalam kebijakan pengelolaan hutan produksi berbasis kemitraan dengan masyarakat. Dalam kemitraan tersebut dibentuk suatu lembaga masyarakat yang dinamakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pendekatan PHBM ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perkembangan yang panjang dengan berbagai kendala. Salah satu kendala dalam menerapkan PHBM adalah keragaman pemahaman stakeholder terhadap konsep dan implementasi PHBM di jajaran internal Perum Perhutani, mulai dari pimpinan, staf sampai ke pelaksana paling bawah di lapangan.

Keragaman ini terjadi setidaknya karena dua hal yaitu: (1) proses pemahaman melalui sosialisasi masih belum efektif; dan (2) perubahan paradigma pengelolaan hutan yang sangat drastis masih sulit diterima dan dilaksanakan.

Keragaman pemahaman di jajaran petugas Perhutani mengakibatkan terjadinya keragaman pemahaman di kalangan masyarakat karena distorsi informasi yang diterima atau cara penyampaian informasi yang tidak efektif. Akibatnya, ada LMDH yang belum mampu mengelola hutan dan ada yang berhasil mengelola dengan baik.

Beberapa penyebab LMDH belum mampu mengelola hutan dengan baik antara lain:

- Ada keragaman pemahaman di antara masyarakat tentang PHBM dan LMDH.
- LMDH bersikap pasif, baru bereaksi apabila ada tawaran dari pihak lain.
- Proses pembentukan LMDH sering agak dipaksakan terutama karena waktu yang disediakan untuk "membentuk" lembaga ini sangat singkat.

Sedangkan LMDH yang telah berhasil, ternyata sebagian warga masyarakatnya telah memiliki kapasitas yang memadai sebelum LMDH dibentuk, ditambah lagi adanya proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat serta intensif dan dilakukan secara terencana, baik oleh Perhutani, mitra Perhutani atau lembaga lainnya. Kapasitas yang memadai yang dimiliki oleh masyarakat dan tokoh-tokohnya merupakan modal dalam mendukung keberhasilan PHBM. Apalagi didukung oleh pemberdayaan dan pendampingan yang tepat, maka kapasitas dan kemampuan masyarakat akan lebih berkembang.

Salah satu metode yang telah terbukti dapat membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam berbagai program pembangunan adalah pendekatan sekolah lapangan (SL), yang dalam hal ini adalah sekolah lapangan untuk pengelolaan sumberdaya alam (SL-PSDA).

Pemilihan Metode Sekolah Lapangan

Meskipun SL-PSDA terbukti dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam, namun metode ini tidak begitu saja bisa diadopsi dan diterapkan di seluruh wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) karena penyelenggaraan SL-PSDA per unit kelompok (desa) perlu biaya besar, waktu lama dan tenaga pendamping berpengalaman.

Penyelenggaraan SL-PSDA di semua desa hutan dalam lingkup KPH Malang yang meliputi 138 desa tidak mungkin dilaksanakan secara serentak, karena keterbatasan biaya dan tenaga. Oleh karena itu, perlu dicari terobosan-terobosan agar dapat menerapkan SL untuk kelompok masyarakat desa sekitar hutan. Sejauh ini SL sudah dilaksanakan di beberapa desa hutan melalui program kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perhutani dan pihak-pihak lainnya, namun belum menjangkau seluruh desa dalam KPH Malang. Agar seluruh desa dalam KPH Malang dapat dijangkau maka perlu dilakukan modifikasi metode SL-PSDA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi KPH dan LMDH.

SL-PSDA Sebagai Modifikasi dari Metode Sekolah Lapangan

Pada dasarnya, SL-PSDA tidak berbeda dengan prinsip-prinsip SL secara umum, yakni:

- Menggunakan pendekatan partisipatif dalam seluruh proses kegiatan.
- Menggunakan metode pembelajaran orang dewasa dalam proses belajar-mengajar.
- Mempelajari dasar-dasar ekologi lingkungan dan ketrampilan manajemen.
- Petani menentukan pilihan dalam melakukan teknik konservasi sumberdaya alam yang didasarkan pada temuan atau pengalaman lokal pribadi/kelompok.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, maka SL-PSDA memiliki ciri-ciri khas sebagaimana SL pada umumnya, yakni:

- Petani sebagai ahlinya
- Lapangan merupakan lokasi belajar
- Pendamping sebagai fasilitator bukan instruktur
- Peran ilmuwan atau spesialis sebagai konsultan
- Kurikulum bersifat terpadu
- Pelatihan mengikuti siklus musiman
- Pertemuan rutin dan terjadwal
- Bahan ajar berasal dari hasil pengembangan oleh peserta belajar
- Dinamika kelompok

SL dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Persiapan
2. Pelatihan calon fasilitator tingkat desa
3. Tindak lanjut oleh fasilitator desa
4. Pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas tema/topik, diagnosa dan identifikasi masalah, membandingkan alternatif solusi dan menyusun rencana tindak lanjut
5. Pelaksanaan SL mandiri oleh petani
6. Tindak lanjut setelah kegiatan SL
7. Temu lapangan

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan melibatkan peran serta masyarakat digunakan untuk membahas tema/topik SL di tiap desa/kelompok LMDH. PRA ini mencakup analisa pola perikehidupan yang berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Analysis*). Analisis ini bertujuan agar masyarakat (pengguna *tool*) dapat menentukan status perikehidupan yang mereka miliki dengan mengacu pada kebutuhan hidup meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya infrastruktur. Peralatan dalam PRA dan manfaatnya dalam konteks pelaksanaan PHBM antara lain:

1. Pemetaan kawasan (partisipatif) untuk mengenali wilayah wengkon, pesanggem, serta kondisi umum di seluruh wengkon.
2. Penelusuran kawasan (transek) untuk memahami kondisi, potensi dan permasalahan di seluruh wengkon, mengetahui interaksi antar posisi di dalam hamparan (contoh: hulu hilir dalam DAS).
3. Analisis kecenderungan untuk memahami





perkembangan kondisi dulu, sekarang dan yang akan datang. Membuat indikator untuk menilai kerusakan atau perbaikan kondisi.

4. Analisis kalender musim untuk memahami perubahan, permasalahan dan keterkaitan-keterkaitan antara satu hal dengan lainnya seiring dengan musim hujan dan kemarau.
5. Analisis pola hubungan antar lembaga (Analisis stakeholder) untuk mengetahui siapa saja yang terkait dengan pengelolaan SDA, serta memahami kepentingan dan peran masing-masing.

Implementasi SL-PSDA di Pujon dan Ngantang

SL-PSDA dilaksanakan secara serentak di enam desa di wilayah Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang (Kabupaten Malang), yaitu Pandesari, Madiredo, Tawang Sari (BKPH Pujon) dan Ngantru, Sidodadi, Tulungrejo (BKPH Ngantang).

Pada tahap awal SL, pihak-pihak terkait seperti LMDH dan Perum Perhutani KPH Malang dilibatkan secara aktif dalam pembahasan tentang teknik dan metode pelaksanaan yang selanjutnya dibahas secara intensif bersama Seksi PHBM, BKPH dan LMDH, sehingga dihasilkan rencana pelaksanaan SL.

1. Persiapan SL

Dalam perencanaan SL, ada dua topik utama yang dibahas yaitu pengembangan kurikulum dan penyusunan jadwal.

a. Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum mencakup:

- Pemilihan topik yang dibutuhkan
- Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam SL merupakan metode baru, yaitu metode cara belajar orang dewasa yang dilakukan berulang-ulang dalam sebuah seri kegiatan. Sedangkan metode yang digunakan sebelumnya adalah metode ceramah yang dilakukan hanya sekali kepada kelompok tertentu dan selanjutnya mereka akan meneruskan sosialisasi kepada kelompok lain secara berjenjang. Oleh karena itu, pengenalan metode dan teknik-teknik pelatihan menjadi bagian yang sangat penting dalam program SL.
- Identifikasi calon fasilitator lokal. Fasilitator lokal harus dipilih secara tepat yaitu yang berpengalaman dan sudah dikenal sebagai mitra, misalnya dari LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Diklat, Instansi Pemerintah, dan dari Perum Perhutani sendiri.

b. Penyusunan jadwal

Penyusunan jadwal menjadi masalah yang rumit, karena proses pembelajaran yang rutin dalam periode waktu lama tidak biasa dilakukan dalam LMDH. Akhirnya disepakati bahwa SL dilaksanakan sekali seminggu selama 6 minggu berturut-turut pada setiap LMDH untuk sebuah topik. Topik yang dipilih akan diusulkan oleh masing-masing LMDH pada saat mengikuti pelatihan fasilitator.

2. Pelatihan Fasilitator Lokal

Tahap pertama SL adalah mempersiapkan fasilitator dari setiap desa melalui pelatihan bagi pelatih (Training of Trainers - ToT). Setiap LMDH mengirimkan enam orang untuk ikut dalam pelatihan fasilitator lokal, terdiri dari empat orang pengurus dan anggota LMDH atau tokoh masyarakat desa dan dua orang dari setiap BKPH (mantri dan/atau mandor). Pelatihan dilaksanakan di Desa Ngantru (Kecamatan Ngantang) selama seminggu dengan topik: (a) Paradigma pembangunan berbasis masyarakat dan pengorganisasian kelompok masyarakat; (b) Dasar-dasar dan Prinsip Kepemanduan; (c) Pengenalan Konsep dan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Alam; (d) Perencanaan dan Penyusunan Rencana Teknis; dan (e) Rencana Pelaksanaan SL di tiap desa.

Pada saat pelatihan berlangsung, setiap peserta dari masing-masing desa mendiskusikan rencana implementasi SL di tingkat LMDH. Sementara itu, para anggota LMDH mempersiapkan rencana pelaksanaan SL di desa masing-masing. Pelaksanaan SL ini didahului dengan pra sekolah lapangan yang merupakan sebuah uji-coba dalam mempersiapkan SL yang nantinya ada dilakukan.

Berdasarkan kesepakatan dan karena berbagai keterbatasan, dalam pelaksanaan SL dipilih satu topik yang dianggap paling diperlukan oleh LMDH. Hasil diskusi setiap LMDH disajikan dalam pertemuan pleno di hari terakhir pelatihan untuk mendapatkan komentar dari kelompok yang lain. Dalam pertemuan pleno ini juga disepakati beberapa ketentuan umum pelaksanaan SL.

3. Tindak lanjut oleh fasilitator desa

Kegiatan tindak lanjut SL dilakukan dengan merencanakan SL di desa masing-masing. Aktivitas dalam perencanaan ini adalah pengorganisasian penyelenggaraan SL mandiri oleh petani terkait dengan pelaksana, dana, tempat, jadwal, dan lain-lain.

4. Pertemuan-pertemuan rutin

Pertemuan-pertemuan rutin dilaksanakan untuk membahas tema/topik, diagnosa dan identifikasi masalah, membandingkan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut

a. Tema/topik.

Tema yang dipilih oleh petani mengacu pada permasalahan yang ada dan perlu segera diselesaikan pada masing-masing desa, misalnya tentang penanaman kopi, pembuatan pupuk organik, pengembangan tanaman durian, dan sebagainya.

b. Diagnosa dan identifikasi masalah.

Setelah tema disepakati, tahapan selanjutnya adalah membuat diagnosa dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani. Permasalahan yang ditemukan tersebut dipilih sebagai topik untuk dipelajari dalam SL, sebagai contoh permasalahan yang berkaitan dengan penanaman kopi adalah pembibitan, hama dan penyakit, pertumbuhan tidak seragam, dan sebagainya.

c. Membandingkan alternatif solusi.

Berbagai solusi untuk memecahkan permasalahan diinventarisasi dan dipilih beberapa yang paling relevan untuk dibahas dalam SL.

d. Menyusun rencana tindak lanjut.

Setelah semua dipersiapkan, fasilitator desa bersama petani mempersiapkan rencana pelaksanaan SL mandiri yang meliputi pengorganisasian pelaksanaan, topik, kurikulum dan narasumber.

5. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Mandiri

SL mandiri merupakan SL yang dilakukan oleh petani dengan difasilitasi oleh fasilitator lokal yang telah dilatih dalam pelatihan calon fasilitator tingkat desa.

Salah satu dampak dari pelatihan untuk pendamping adalah timbulnya komunikasi antar peserta maupun antar LMDH sehingga terjalin kerjasama dan saling tukar informasi kegiatan masing-masing. Para fasilitator lokal akan melaksanakan program kegiatan SL mandiri sesuai dengan rencana topik-topik yang telah disepakati di enam desa. Selain topik, penggunaan dana juga telah disepakati oleh seluruh peserta. Pelaksanaan SL Mandiri dipandu oleh





tenaga-tenaga lokal yang sudah dilatih dan didampingi oleh peneliti/fasilitator dalam pelatihan (ToT) yang telah dilakukan sebelumnya

6. Tindak lanjut setelah kegiatan SL

Tindak lanjut dari kegiatan SL di masing-masing kelompok berbeda-beda tergantung pada kondisi yang sesuai di desa masing-masing. Kegiatan tersebut adalah: Desa Pandesari melakukan penanaman kopi di bawah tegakan; Desa Tawangsari melakukan pembibitan tanaman kayu-kayuan; Desa Madiredo melakukan pembibitan tanaman kopi arabika; Desa Ngantru melakukan penanaman kopi dan durian; Desa Sidodadi melakukan penanaman kopi arabika dan Desa Tulungrejo melakukan penanaman tegakan suren dan jabon.

7. Temu Lapangan: Sosialisasi Kegiatan LMDH kepada Stakeholder

Kegiatan SL yang sudah dilaksanakan dan diikuti dengan kegiatan tindak lanjut oleh masing-masing LMDH dari enam desa akhirnya disebar-luaskan kepada para stakeholder terutama mitra pengambil kebijakan melalui Temu Lapangan.

Tujuan kegiatan Temu Lapangan PSDA (Field Day) adalah:

1. untuk menyampaikan hasil-hasil yang dicapai oleh kelompok-kelompok peserta SL-PSDA kepada

stakeholders, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Malang;

2. untuk membangun komunikasi antar stakeholders dan mencari dukungan bagi kelanjutan program dan kegiatan kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan di kawasan DAS Kali Konto Hulu.

Kegiatan temu lapang yang telah dilaksanakan sebagai penutup SL menghasilkan dampak positif bagi enam LMDH penyelenggara dan LMDH lainnya di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, antara lain:

1. Membuat komitmen untuk melanjutkan kegiatan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dan membentuk sebuah paguyuban yang meliputi seluruh LMDH di Kecamatan Pujon dan Ngantang yang terdiri dari 21 kelompok LMDH.
2. Perum Perhutani KPH Malang membuka kesempatan untuk berdialog dengan LKDPH guna membicarakan berbagai hal yang masih belum dipahami dan dianggap masalah oleh kedua pihak.
3. Pernyataan politis dari Kepala Daerah Kabupaten untuk mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam dan menjadikannya sebagai prioritas program kerja Kabupaten Malang periode yang akan datang.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pra SL-PSDA di enam LMDH di wilayah KPH Malang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode ceramah yang digunakan dalam penyuluhan dan sosialisasi PHBM hasilnya kurang efektif.
2. Perlu diterapkan metode penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan yang lebih variatif dan bersifat partisipatif serta didasarkan pada prinsip pembelajaran kepada orang dewasa. Salah satu metode yang bisa diterapkan pada kelompok LMDH adalah SL, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perhutani dan LMDH.
3. Uji-coba penerapan sekolah lapangan di enam LMDH memberikan pembelajaran yang positif bagi pemberdayaan LMDH, meskipun masih ada banyak kekurangan mendasar yang dimiliki oleh LMDH untuk dapat menjadi mitra Perhutani dalam PHBM. Beberapa kelemahan yang terungkap melalui SL antara lain:
 - Pengurus/anggota LMDH umumnya masih belum memiliki kemampuan berorganisasi yang dibutuhkan dalam mengelola LMDH terutama dalam hal manajemen organisasi dan teknik penguatan kelompok.
 - Personal LMDH umumnya lemah dalam melakukan diagnosis evaluasi diri, analisis kebutuhan, menyusun dan memilih prioritas program serta menuangkan dalam proposal. Kemampuan LMDH untuk membuat perencanaan sangat lemah, sehingga seringkali tidak mampu mengantisipasi tawaran dari pihak luar (Perhutani atau stakeholder lainnya).
4. Pelaksanaan SL yang melibatkan pengurus dan petani hutan menimbulkan gairah yang lebih besar untuk melakukan program-program rutin LMDH.
5. Pelaksanaan SL memang memerlukan biaya besar dan waktu banyak, tetapi jika menjadi kegiatan rutin maka pembiayaan bisa ditekan dan sebaliknya bisa menambah curahan waktu untuk SL.
6. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, sekolah lapangan (SL-PSDA) dapat diadopsi dan diterapkan untuk pemberdayaan LMDH.



FORDFOUNDATION



Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi

Widianto

Jurusan Tanah fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya
Jl. Veteran No. 1 Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia
E-mail: wied.widianto@gmail.com

Laporan singkat ini disusun oleh:
Widianto, Noviana Khususiyah dan Iva Dewi Lestariningsih
Editor: Subekti Rahayu

Layout: Yana Buana dan Josef Arinto

Foto: Iva Dewi Lestariningsih, Noviana Khususiyah dan Yana Buana